

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah adanya kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Keberadaan partai politik (parpol) sangatlah penting karena partai politik tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Partai politik berperan sebagai tempat atau wadah penyeleksian para calon pemimpin dengan caranya mereka masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan yang telah di atur dalam undang undang itu sendiri. Di suatu negara yang ber asaskan demokrasi, suatu kesempatan pemilu (pemilihan umum) di anggap sebagai tanda atau lambang, sekaligus menjadi parameter dari apa yang dinamakan sebagai demokrasi itu sendiri, hasil pemilu di selenggarakan dalam susana keterbukaan dengan kebebasann berserikat dianggap mencerminkan partisipasi dari masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl sebuah demokrasi idealnya memiliki 5 (lima) kriteria yang menunjukkan suatu negara itu termasuk ke dalam negara demokrasi atau tidak, yakni: (1) persamaan dalam hak pilih untuk menentukan suatu pilihan yang bersifat kolektif yang mengikat, (2) partisipasi efektif, yakni suatu kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat atau warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembenaran suatu kebenaran, yakni terdapatnya suatu kesempatan yang

sama bagi setiap orang dalam memberikan penilaian terhadap proses perjalanan politik dan pemerintahan dengan cara yang logis, (4) kontrol terhadap suatu keagendaaan, yakni dengan kekuasaan eksklusif bagi warga negara untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak di putuskan melalui suatu proses pemerintahan, (5) pencakupan, terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan kelima kriteria tersebut, salah satunya yaitu partisipasi efektif, telah dilaksanakan dan masih berlangsung di Indonesia yakni melalui Pemilu (Pemilihan Umum) (Zoltan T.P, 2007)

Aurel Croissant sebagaimana dikutip oleh Prihatmoko (2008: 4-5) mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu, fungsi keterwakilan, fungsi integrasi, fungsi mayoritas. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas Masing-masing partai politik sebagai peserta Pemilu memiliki cara- cara tersendiri untuk memperoleh dukungan dan suara (vote) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi komunikasi politik.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa momentum tahun yang akan datang yakni tahun 2019 merupakan momentum pesta rakyat dalam menentukan suatu kepemilihan baik di tingkat Legislatif maupun Eksekutif. Begitu banyak cara atau upaya yang dilakukan suatu partai politik di dalam negeri ini yakni Indonesia mereka (parpol) sangatlah giat dalam hal meraih suara dalam pemilihan umum baik di tingkat

Kabupaten/kota hingga DPR RI, dalam hal ini Legislatif, maupun Eksekutif yang menduduki kursi RI sebagai Presiden.

Gegap gempitanya suatu pemilihan presiden tahun 2019 sudah di rasakan sejak terpilihnya presiden Ir, H. Joko Widodo, karena kemenangan beliau sangat tipis melawan partai oposisi terutama karena partai partai tersebut tidak mendapatkan kursi di kabinet. Berbagai isu dan ujaran kebencian di beritakan baik di sosial media maupun media cetak, seperti ujaran kebencian yang di lontarkan oleh salahsatu pemilik akun di sosial media yang mengatakan bahwa “Tembak mati Jokowi sampai darah keturunannya memakai mandat utama patriot kepahlawanan para pahlawan & para pejuang bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sah dan mutlak menjadi pahlawan tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia)” akan tetapi kasatreskrim Polresta Surakarta Kompol Agus Puryadi mengatakan pihaknya telah memantau akun tersebut. Dan menghukum sesuai dengan apa yang telah di lakukannya. (Isnanto, 2018) ini merupakan salah satu dari sekian banyak ujaran kebencian mengenai presiden Indonesia sejak dari terpilihnya Presiden Indonesia Tahun 2014-2018. Akan tetapi tidak semua mengenai ujaran kebencian maupun SARA yang di keluhkan dari beberapa masyarakat di Indonesia ada pula berbagai penghargaan yang telah di peroleh oleh Ir, H. Joko Widodo. salah satunya yakni Ir, H. Joko Widodo merupakan salah seorang Tokoh Muslim yang sangat berpengaruh di Dunia. Presiden Jokowi berada di urutan ke-16. Dalam publikasinya, para editor survei ini mengutip ucapan Jokowi yang menyatakan "keberagaman selalu menjadi

bagian dari DNA Indonesia. Meskipun banyak tantangan, Islam di Indonesia selalu menjadi kekuatan yang moderat". (Jokowi Masuk 500 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia, 2018)

Wacana politik Islam di dalam negeri ini (Indonesia) selalu menjadi bahan yang sangatlah menarik perhatian publik atau suatu kalangan. Alasan yang di kemukakan sangatlah sederhana. Agama Islam adalah agama yang dianut atau dipeluk oleh kebanyakan penduduk Indonesia. Islam pun merupakan ajaran yang dapat memberikan poin poin penting dalam suatu permasalahan politik atau biasa disebut siyasah. Dengan sebab itu sangatlah kuat kaitannya antara Islam dan politik dengan dapat memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Perdebatan mengenai dasar negara menjelang dan setelah kemerdekaan ini merupakan catatan yang sangat sulit di lupakan dari perjalanan sejarah Islam politik berikutnya. Ketika beberapa "pasal UUD 1945 diamandemen mengikuti era baru politik Indonesia, muncul pula ke permukaan isu sejarah lama yang menggarisbawahi cita-cita politik Islam yang pernah mengemuka hangat dalam majelis konstituante."

Meskipun pada kenyataannya Kota Yogyakarta menjadi basis bagi mayoritas anggota salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bukan berarti PKS tak memiliki tempat di DIY. Jika di lihat dari tiga Pemilu terakhir, PKS selalu memperoleh suara yang relatif stabil. Namun partai yang dulunya bernama partai keadilan (PK) ini masih memiliki beberapa kendala seperti masih lemahnya relasi

politik dengan publik, ruang lingkup komunikasi politik resiprokal yang sempit, minimnya pendekatan publisitas, pendekatan persuasi yang tidak merata, kegagalan dalam membangun manajemen reputasi politik, minimnya hubungan politik dengan publik, dan minimnya *political community building* (pembangunan komunitas politik). Sehingga kedepannya di dalam pemilu mendatang, PKS bisa meningkatkan presentase jumlah suara (Aufa, 2004)

Yang tidak kalah pentingnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu contoh yang terlibat dalam hingar bingar ramainya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Indonesia. Bahkan jauh sebelum pemilihan presiden tahun 2019 mereka sudah mempersiapkan kader baik untuk menjadi presiden atau pendamping (wakil presiden). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan perubahan dari Partai Keadilan (1999) adalah salah satu partai politik (parpol) yang memiliki ideologi Islam. PKS dapat dibilang sebagai partai baru karena resmi pada tahun 2003 yang merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) dan PKS. Sejak pemilu 2004 PKS menunjukkan taringnya sebagai salah satu parpol yang cukup kuat dan diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Di tahun 2004, PKS berhasil memperoleh sekitar 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% total perolehan suara. Pada pemilu selanjutnya di tahun 2009 PKS memperoleh suara yang cukup stabil yakni sebesar 8.206.955 suara atau 7,88% dan menempati peringkat keempat. Sementara pada tahun 2014 PKS berhasil meningkatkan jumlah pemilih walau tidak signifikan dengan jumlah suara 8.480.204 atau sebesar 6,79% dan menempati peringkat ke-tujuh

dari lima belas partai yang berkompetisi merebutkan kursi legislatif. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2014)

Berbeda dengan PKS, partai-partai besar seperti suara Partai Demokrat memiliki kenaikan jumlah suara secara tajam. Sedangkan partai-partai besar lainnya seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PPP, cenderung mengalami penurunan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu mempertahankan perolehan suaranya seperti pada pemilu pada tahun 2004. Kenyataan ini telah menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang di pakai oleh PKS menjelang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Naiknya pamor PKS yang diperoleh pada tahun 2004 dan stabilnya perolehan suara PKS merupakan hasil dari strategi dan juga program yang sudah dibuat. Strategi komunikasi politik dari PKS inilah yang menyebabkan PKS tetap bertahan dalam kancah perpolitikan terutama dalam ajang pemilu. PKS sebagai partai politik memiliki keunikan tersendiri, PKS berbeda dengan parpol lainnya yang mengutamakan figur pimpinan mereka namun lebih membawa jargonnya “Bersih, Peduli, dan Profesional”. PKS berusaha menonjolkan jargon partai yang dianggap dapat lebih menyentuh kepada masyarakat serta totalitas dan juga loyalitas dari kader-kader PKS yang tetap setia dan membawakan sikap nyata di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun PKS sempat tertimpa kabar yang merugikan partainya yakni terkait isu korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden partai Lutfi Hasan Ishaq, tetapi PKS tetap bertahan dengan jumlah pemilih yang tidak sedikit yaitu sekitar 8 juta empat ratus pemilih. Basis pemilih yang loyal lah yang menjadi kekuatan PKS dapat eksis dalam ranah perpolitikan Tanah Air.

Tidak ada yang bisa terlepas dari dunia komunikasi termasuk salah satunya yakni politik. Karena suatu kegiatan politik pasti saja didasari oleh suatu komunikasi seperti bagaimana menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Negara. Komunikasi politik adalah bagian dari 7 sistem politik yang tidak dapat berjalan sendiri, karena komunikasi ini lah yang dapat saling membantu berjalannya suatu sistem-sistem politik lainnya.

Selain itu guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik yang jitu. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu.. Strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. Karena strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun

dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat.

Bisa kita gambarkan seperti pemilu (Pemilihan Umum) presiden yang sudah barang tentu merupakan kegiatan komunikasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena salah satu definisi politik adalah salah satu bagian dari seni yang memperebutkan sesuatu dalam hal jabatan seperti presiden contohnya. Terdapat beberapa strategi dalam memperebutkan suatu kekuasaan “bangku presiden” salah satunya yakni adanya pencitraan calon presiden yang mengikuti pemilihan umum. Pencitraan politik yang seperti ini sebetulnya sudah merebak mulai dari awal pemilu tahun 1999 yang semakin lama semakin berkembang hingga saat ini yang terjadi.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis memilih judul skripsi **Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2019**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi Partai Keadilan Sejahtera menjelang pilpres tahun 2019 di kota Yogyakarta?
2. Komunikasi seperti apa yang sepatutnya dilakukan PKS menjelang pilpres tahun 2019 mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Dasar rumusan tersebut di atas penulisan menentukan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Partai Keadilan Sejahtera menjelang pilpres tahun 2019 di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui komunikasi seperti apa yang di sepatutnya di lakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera menjelang pilpres tahun 2019 di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangsih bagi studi ilmu pemerintahan khususnya penelitian partai politik islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak PKS agar dapat melihat seberapa jauh komunikasi yang selama ini telah di bangun demi mencapai suatu ketercapaian dalam berkomunikasi menuju pilpres yang akan di laksanakan yakni pada tahun 2019 mendatang.
- b. Bagi Masyarakat, agar lebih mengetahui seberapa jauh gerak langkah nyata PKS terutama dalam menjalankan komunikasi politik di masyarakat luas.

- c. Bagi Partai, dapat di jadikan acuan dalam menerapkan komunikasi politik bagi partai di lingkungan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui hasil penuturan dari sepuluh tinjauan pustaka yang relevan maka dapat di kelompokkan yaitu yang menjadi dua tema untuk dapat memberikan perbandingan peneliti bahwa apa yang akan di tulis peneliti memang berbeda, selain itu juga dapat menjadi referensi untuk digunakan peneliti dalam sitem penulisan maupun teknik penelitian yang sudah ada sebelumnya, dari dua pengelompokan tema yang sudah digunakan peneliti untuk menjadi tinjauan pustaka yaitu:

Pertama peneliti mengambil tinjauan pustaka dengan tema komunikasi politik yang di kelompokkan berjumlah empat tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka yang ada konsep komunikasi politik menurut Karim Suryadi yang mengemukakan bahwa komunikasi partai politik sangatlah penting dalam menyikapi kehidupan partai politik serta sulitnya mengganti peran partai dalam sistem partai politik modern. Pada umumnya tiga penulis lainnya memaparkan konsep komunikasi politik yang sama dalam menjelaskan fenomena partai dalam berhubungan di kancah politik Indonesia.

Kedua yaitu tema yang dikelompokkan oleh penulis ini tidak jauh berbeda dengan tema di atas, namun kali ini akan berbicara lebih spesifik mengenai strategi komunikasi partai politik, pada tema ini penulis memberikan 6 tinjauan pustaka untuk mendapatkan sebuah perbandingan. Pertama yang di tulis oleh Ahmad Miftakhudin yang mengidentifikasi upaya DPW partai persatuan pembangunan dalam

mewujudkan kader yang berkarakter, Islami dan memiliki jiwa patriotisme sehingga menjadi politikus yang memiliki integritas. Pada umumnya lima penulis lainnya memaparkan konsep strategi komunikasi politik melalui peran media dan komunikasi untuk mencapai tujuan partai tersebut.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009	Aminulloh, (Aminulloh A. , 2010)	Pemilihan Legislatif tahun 2009 banyak diikuti partai politik dengan mengalami beberapa persaingan yang sangat ketat. Semua strategi taktik dan metode pasti akan di gunakan oleh parpol untuk pencapaian kemenangan untuk itulah mengapa komunikasi politik itu sangatlah penting.
2.	Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik	Atie Rachmiate, O Hasbiansyah, Ema Khotimah, Dadi Ahmadi (Rachmiate, 2013)	Kebebasan informasi telah menjadi momentum bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
3.	Tipologi iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2009 di televisi	Farah Ramadhan (Ramadhan, 2011)	Terdapat iklan politik PKS pada pemilu 2009 dan relevansi antara

			tipologi iklan politik PKS dengan target khalayak yang menjadi sasaran PKS sebagai tujuannya.
4.	The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation	Peter Dahlgren (Dahlgren, 2005)	Tema Internet dan ranah publik sekarang memiliki tempat permanen di agenda penelitian dan dalam penyelidikan intelektual; itu memasuki arus utama studi komunikasi politik.
5.	The Third Age of Political Communication: Influences and Features	Peter Dahlgren (Blumler, 1999)	Artikel ini mengidentifikasi perubahan kunci dalam masyarakat dan media yang telah membentuk komunikasi politik di banyak negara demokrasi selama periode pasca perang.
6.	Strategi Komunikasi Politik Partai Pada Pemilu Legislatif 2009	Aminulloh, Akhirul (Aminulloh A. , 2011)	Pemilu Legislatif 2009 diikuti oleh beberapa partai politik dengan berbagai macam cara atau strategi untuk mendapatkan suara terbanyak. Peran komunikasi dan media sangatlah penting.
7.	Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy	Karim Suryadi (Suryadi, 2010)	Betapa masih banyak masalah di dalam kehidupan partai politik di Indonesia. Namun sulit mengganti peran partai dalam sistem politik modern. Maka komunikasi sangatlah penting dalam

			menyikapi masalah di dalam kehidupan partai politik.
8.	Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009	Tawakkal, George Towar Iqbal. (Tawakkal, 2009)	Ketika partai politik mendapatkan kursi legislatif, jadi kandidat partai itu mendapatkan lebih banyak pemilih daripada yang lain.
9.	Komunikasi Politik Penguatan Kader (Studi Pada DPW Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Ahmad Miftakhudin (Miftakhudin, 2017)	Upaya DPW Partai Persatuan Pembangunan dalam mewujudkan kader yang berkarakter, islami, dan memiliki jiwa patriotisme sehingga menjadi politikus yang memiliki integritas.
10.	Orientasi Dakwah Partai Politik Islam (Studi Analisis Orientasi Dakwah Partai Politik Berazaz Islam: DPW PPP di Yogyakarta)	Abdul Hamid (Hamid, 2004)	Di dalam analisis penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data, bagaimana peneliti dapat mengorientasi dakwah partai politik islam.

Dari beberpa penelitian yang dipaparan dari tinjauan pustaka di atas pada dasarnya semua berfokus pada strategi komunikasi politik, dan komunikasi politik. Belum ada yang memaparkan komunikasi politik PKS secara spesifik di Yogyakarta terutama strategi dalam menjelang pemilihan presiden tahun 2019 yang akan mendatang.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang di kemukakan partai partai politik lain, adapun penelitian ini berfokus pada agenda pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peneliti akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera menjelang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

F. Kerangka Teori

Untuk memberikan pemahaman yang komperhensif, maka penting kiranya bagi peneliti untuk memberikan gambaran mengenai sejumlah teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun bebrapa teori dan konsep tersebut yaitu Komunikasi Politik, Parpol (Partai Politik), Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Komunikasi Politik

Dalam buku Nimmo di dalam bukunya di jelaskan pengertian Komunikasi Politik dengan formula seperti ”siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui media yang seperti apa, dan bagaimana efeknya atau dampaknya. (*who says what, to whom, with what channel, and with what effect*). (Nimmo, 2005).”

Jauh di dalam buku penjelasan Nimmo dapat kita ketahui bagaimana suatu komponen-komponen kajian komunikasi politik. “Ruang lingkup kajian komunikasi politik tersebut yakni komunikator politik (siapa), pesan politik (berkata seperti apa) Khalayak politik (kepada siapa), media komunikasi

politik (melalui saran apa), dan bagaimana efek dari politik tersebut. (Arifin, 2011) pembahasan ini akan di bahas dalam komponen-komponen komunikasi politik di bawah ini:”

a. Komunikator Politik

Sebagaimana komunikasi pada umumnya, seorang komunikator dalam komunikasi politik bisa di bedakan dengan wujud individu individu yang berbeda, ataupun berupa lembaga atau sebuah kumpulan banyak orang (kolektif). Oleh karena itu, apabila terdapat pejabat, seorang tokoh maupun rakyat biasa bisa bertindak sebagai sumber dari dalam suatu kegiatan komunikasi politik, memang secara jelas dapat di bedakan bahwa pendapat masing masing individu itu berbeda dan sangat berpengaruh. (Arifin, 2011, hal. 43)

“Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian sumber komunikasi politik adalah mereka – mereka yang dapat memberi informasi tentang hal – hal yang mengandung makna atau bobot politik , misalnya Presiden, Menteri, Anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur, Bupati / Walikota, DPRD, politisi, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.”

b. Pesan politik

Pesan adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang – terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya Pidato politik, undang – undang kepartaian, undang – undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku / brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baleho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (psywar), dan sebagainya.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik adalah “alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan – pesan politiknya.

Misalnya :

a. Media cetak

Contohnya : surat kabar, tabloid, majalah dan buku

b. Media elektronik

Contohnya : film, radio, televisi, video, computer, internet

c. Media format kecil

Contohnya : leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin d.

d. Media luar ruang (out door media)

Contohnya: baliho, spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, kalender, kulit buku, block note, pulpen, gantungan kunci, payung, dos jinjingan, dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun citra (image building).”

d. Sasaran atau target politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat pemilihan umum. Mereka adalah buruh, pemuda, perempuan, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak), orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, petani yang berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

e. Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah “terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai – partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali

Kota dan Wakil Wali Kota sampai pada tingkat DPRD. (Hafied Cangara, 2009 : 37-38).”

2. Partai Politik

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan bukan berdasarkan pada hukum rimba. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan tata kelola kenegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya termaktub dalam konstitusi, termasuk di dalamnya tentang keberadaan partai politik itu sendiri.

Di dalam “UU No. 2 Tahun 2011, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.” Dan secara umum partai politik didefinisikan sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak memiliki orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah di tetapkan. (Budiarjo, 2008) Lebih lanjut partai politik dapat di artikan sebagai sekelompok manusia yang mempunyai doktrin politik yang sama. Dan adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2008) adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah atau secara konvensional komunikasi politik di artikan dengan bagaimana proses pesan-pesan politik ini disampaikan kepada komunikan dari komunikator dalam arti yang luas. (Cangara, 2009) Selanjutnya yakni secara *inheren* komunikasi politik pun berupaya untuk menampung dan menggabungkan pendapat masyarakat yang selanjutnya di tindak lanjuti dengan memberikan usul-usul program maupun kebijakan. Hal ini sering di sebut dengan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*), sesudah di gabungkan pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan secara lebih teratur atau yang bisa di sebut sebagai perumusan kepentingan (*interest articulation*) (Budiarjo, 2008)

Lebih lanjut agregasi kepentingan di artikan sebagai cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang di lancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda di gabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik dan artikulasi kepentingan diartikan sebagai suatu proses pengintputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. (Stiyadi, 2008)

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, atau menurut M. Rush mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak dapat menentukan bagaimana persepsi mereka terhadap sistem politik. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

c. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Terdapat dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut yakni rekrutmen secara terbuka maupun tertutup. (Suadh, 2014)

1. Rekrutmen terbuka artinya seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan pertama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
2. Rekrutmen tertutup, yaitu proses rekrutmen secara terbatas, artinya dimana hanya individu-individu tertentu yang dekat dengan penguasa atau pemimpin politiklah yang memiliki kesempatan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan politik.

Dalam hal ini, penulis mendefinisikan konflik dari perspektif konflik interpersonal atau konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik. (Wirawan, 2009)

3. Partai Politik Islam

Partai politik muncul dan berkembang dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama sehingga orientasi mereka bisa bersama-sama dikonsolidasikan. Dengan begitu, maka mereka dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiarjo, 2008)

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuanketentuan Islam, (2003:16).

Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan

lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai (Nasiwan, 2003:101). Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

4. Pemilu (Pemilihan Umum)

Indonesia adalah “suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pada saat ini pemilihan umum adalah wujud yang nyata dari sistem demokrasi elektoral. Pemilihan umum menjadi salah satu ajang partai politik sebagai kontestasi dalam merebut kekuasaan. Hal inilah yang akan melatar belakangi bagaimana komunikasi politik itu sangatlah penting untuk mendapatkan kekuasaan dari suara rakyat.”

Pemilu (pemilihan umum) yang di selenggarakan haruslah dengan situasi keterbukaan dan kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berserikat, yang dianggap mencerminkan dengan akurasi partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Pada sebenarnya, pemilihan umum adalah sarana yang telah tersedia bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum itu adalah pada dasarnya yakni lembaga demokrasi yang memilih anggota anggota perwakilan rakyat. Yang pada gilirannya bertugas untuk bersama sma dengan pemerintah, menetapkan suatu politik dana bagaimana jalannya.

Ilmu Politik di kenal beragam sistem pemilu dengan ragam yang berbeda, akan tetapi tetap pada dua prinsip prinsip yang selalu di pegang atau pokok yakni:

- a. *Single-member constituency* (sistem distrik atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil)
- b. *Multi-member constituency* (sistem perwakilan berimbang atau sisteem peoposional yakni satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil) (Budiarjo, 2008, hal. 461-462)

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perubahan. Definisi konsepsional ini di maksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penjelasan tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan.

Dan adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik dapat kita ketahui bagaimana suatu komponen-komponen atau istilah dengan ruang lingkup kajian komunikasi politik tersebut yakni komunikator politik (siapa), pesan politik (berkata seperti apa) Khalayak politik (kepada siapa), media komunikasi politik (melalui saran apa), dan bagaimana efek dari politik tersebut

B. Partai Politik

Partai Politik dapat di artikan sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak memiliki orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan.

C. Partai Politik Islam

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuanketentuan Islam, (2003:16).

D. Pemilu

Pemilu dapat diartikan sebagai suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang di jadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini di sebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan. Dan adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Definisi Operasional

No	Indikator	Parameter
1	<p>Komunikasi Politik</p> <p>a. Komunikator Politik</p> <p>b. Pesan politik</p> <p>c. Saluran atau Media Politik</p> <p>d. Sasaran atau target politik</p>	<p>a. dapat memberi informasi tentang hal – hal yang mengandung makna atau bobot politik</p> <p>a. pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang – terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.</p> <p>a. alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan – pesan politiknya</p> <p>a. anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat pemilihan umum.</p>

	e. Efek Komunikasi Politik	a. terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai – partai politik yang akan berpengaruh terhadap suara.
--	----------------------------	---

Tabel 1.3
Definisi Konsepsional dan Operasional

No	Definisi Konsepsional	Definisi Oprasional	Instrumen	Kuisisioner/ Wawancara
1.	Komunikasi	1. Penyebab Isu 2. Publik	- positif - negatif - Masyarakat - Pemerintah	K1/W1 K2/W2 K3/W3 K4/W4
2.	Parpol	1. Ideologi 2. Kekuasaan	- Nasionalisme - Fanatisme Agama - Amar Ma'ruf dan Nahi munkar	K5/W5 K6/W6 K7/W7 K8/W8
3.	Pilpres 2019	1. Petahana 2. Oposisi	- Jabatan - Perubahan	K9/W9 K10/W10

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memakai suatu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya penulis tidak menggunakan hipotesa tetapi hanya

menghubungkan dan melukiskan apa yang menjadi objek dan subjek masalah serta kemudian menguraikannya secara rinci.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu peneelitan yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif secara sistematis melakukan pengumpulan data, pengorganisasian data dan mengintrepretasikan informasi tekstual termasuk video dan gambar, serta menggunakan pendekatan induktif dalam menguak fenomena yang sulit untuk dikuantifikasi (Young & Hren, 2008). Apabila ditinjau dari taraf pemberian informasi atau penyajian penelitian, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.

Indikator yang kemudian di jadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah definisi oprasional yang merupakan bentuk reduksi dari kerangka teori.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian komunikasi partai islam dalam pilpres tahun 2019 yang berada Di Kota Yogyakarta. Yakni berada di pusat kantor Partai Keadilan Sejahtera yang berada di pusat kota Yogyakarta.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah yang di peroleh dari pihak pertama yang sifatnya cenderung lebih subyektif karena bersifat pendapat pribadi yang di kumpulkan melalui kuesioner dan wawancara oleh peneliti.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah di olah oleh pihak ketiga, yang yang dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, desrtasi dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara tertulis dengan observasi langsung di lapangan.

a. Kuesioner

Kuesioner penulis berikan kepada responden dan responden memilih salahsatu jawaban dari:

A. Sangat Memuaskan

B. Memuaskan

C. Biasa Saja

D. Kurang Memuaskan

E. Tidak Memuaskan Sama Sekali

Setiap tingkat jawaban tidak di berikan nominal dan bobot tapi di tentukan oleh beberapa orang yang memilih tingkat jawaban tersebut untuk kemudian di analisis.

b. Wawancara

Wawancara penulis jadikan pelanjut kuesioner untuk mengetahui apakah responden setuju atau mengapa memilih tingkat jawaban tertentu, dengan demikian diberikan sama pada responden yang menerima kuisisioner, tetapi karena bentuknya tertulis ada yang menjawab dan tidak.

c. Observasi

Setiap kejadian di lapangan akan penulis catat tanggal, bulan dengan segala persoalan dan jalan keluarnya, dengan begitu penulis mengetahui perubahan keadaan lokasi penelitian dengan segala situasi dan kondisinya.

d. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau berupa sebuah catatan yang ada serta mencatat keadaan konsep penelitian unit analisa. Sumber datanya bisa berbentuk dokumentasi, media massa, arsip, serta media massa, dan biografi.

e. Responden

Dalam penunjukan responden serta mengambil sample, penulis memakai purposive sampling, karena jumlah yang penulis pakai sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 1.4
Responden

NO	Responden	Jumlah
1.	Partai Non PKS a. PDI Perjuangan (2 org) b. PAN (2 Org) c. Gerindra (2 Org) d. Golkar (2 Org) e. Nasdem (2 Org)	10
2.	PKS a. DPRD (10 Org) b. Anggota Biasa (10 Org) c. Anggota Parpol Selain DPRD (10 Org)	30
3.	Masyarakat a. Guru (5 Org) b. Pedagang (5 Org) c. Mahasiswa (5Org) d. Ojek (5 Org)	20
4.	Pemerintah a. SEKDA (3 Org) b. DINAS (4 Org) c. KPU (3 Org)	10
Jumlah		70

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk memilah-milah data yang telah di kumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan observasi agar menjadi kesatuan yang dapat dikelola serta mencari apa yang penting dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan analisis dimana peneliti mengungkapkan makna dari suatu informasi baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis.